

Analisis Penyelenggaraan Pengawasan Program Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Nifas Risiko Tinggi
oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Pedurungan

Matsna Haniifah – 25010115120105

(2019 - Skripsi)

Angka Kematian Ibu di Kecamatan Pedurungan merupakan tertinggi se-Kota Semarang tahun 2018. Gerakan PKK sebagai lembaga kemasyarakatan memiliki peran penting untuk memberdayakan masyarakat dalam menangani masalah ini melalui program pendampingan ibu hamil dan ibu nifas risiko tinggi. Namun salah target program belum tercapai karena kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan program pendampingan ibu hamil dan ibu nifas risiko tinggi oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan Pedurungan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan metode in-depth interview yang dipilih berdasar teknik purposive. Subjek penelitian yaitu Ketua dan Ketua Pokja 4 TP PKK Kecamatan Pedurungan sebagai informan utama. Informan triangulasi yaitu Ketua dan Ketua Pokja 4 TP PKK Kelurahan Pedurungan Tengah serta Ketua Pokja 4 TP PKK Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengawasan belum dilakukan secara komprehensif dan paripurna dengan tidak dilakukannya pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini karena belum sempurnanya proses perencanaan TP PKK Kecamatan Pedurungan dalam penentuan waktu, penetapan fokus belum sesuai dengan penyebab masalah, perencanaan sasaran belum ditentukan standar, perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan pendanaan belum dapat dilakukan serta bagan mekanisme Gerakan PKK yang belum mencitrakan secara eksplisit tugas dan fungsi pengawasan. Penelitian menyarankan TP PKK Kecamatan Pedurungan untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 sebagai pedoman pengawasan dan melakukan perencanaan pengawasan dengan baik. TP PKK Pusat, Kota Semarang, dan Kecamatan Pedurungan disarankan memperbaiki bagan mekanisme Gerakan PKK, membuat pedoman pengawasan, mengadakan pelatihan manajerial tentang pengawasan dan memandirikan TP PKK wilayah untuk penganggaran dengan tetap memperhatikan unsur hirarkis organisasi PKK

Kata Kunci: AKI, Gerakan PKK, Pengawasan